

## BAB VI

### PENUTUP

#### V.1. Kesimpulan

Pada pelaksanaan prinsip-prinsip *democratic governance* dalam bidang pembangunan di Nagari Pandai Sikek, ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip tersebut telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat kekurangan pada beberapa indikator yang menyebabkan pelaksanaannya belum optimal.

Pertama, yaitu prinsip akuntabilitas, dalam pelaksanaannya di Nagari Pandai Sikek dijelaskan bahwa setiap keputusan sudah dibuat secara tertulis. Tidak adanya standar baku dalam pembuatan keputusan, pembuatan keputusan dilakukan dengan merangkul aspirasi masyarakat yang dimulai dari musyawarah tingkat jorong serta lembaga unsur yang ada. Keputusan yang diambil memiliki arah sasaran yang jelas dan berdasarkan pada visi dan misi Nagari, akan tetapi tidak semua visi dan misi tersebut dapat terealisasi karena harus menyesuaikan dengan keadaan di lapangan tidak adanya mekanisme yang menjamin bahwa standar telah terpenuhi serta kurang berfungsinya BPRN dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya, sehingga mekanisme pertanggungjawaban juga kurang terlaksana. Akan tetapi, kekurangan tersebut dapat diatasi dengan ikut sertanya KAN beserta lembaga unsur yang ada untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan setiap keputusan. Pada tahap

sosialisasi keputusan, cara yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari adalah dengan mengumumkannya di masjid dan memaksimalkan peran Wali Jorong untuk menyampaikan kepada masyarakat. Untuk keakuratan dan kelengkapan informasi masih kurang optimal karena keterbatasan sarana penyampaian informasi tersebut. Pada bagian monitoring hasil, Pemerintah Nagari kembali mengadakan musyawarah untuk mengevaluasi hasil dari pelaksanaan keputusan.

Kedua, yaitu transparansi, sistem keterbukaan informasi secara khusus belum ada, cara yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari adalah dengan mengoptimalkan setiap musyawarah yang ada agar masyarakat dapat mengakses informasi, semua pertanyaan-pertanyaan publik terkait pembangunan dapat ditanyakan langsung kepada Pemerintah Nagari. Untuk mekanisme pelaporan penyimpangan tindakan aparat nagari, dapat dilaporkan langsung kepada Wali Nagari atau kepada BPRN serta lembaga unsur yang ada. Kekurangan dalam pelaksanaan prinsip ini, Wali Nagari kurang transparan dalam pelaporan keuangan sehingga memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Ketiga, yaitu partisipasi masyarakat, dalam pelaksanaannya di Pandai Sikek dijelaskan bahwa forum yang menampung aspirasi masyarakat adalah melalui kegiatan Musrenbang. Dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat cukup mampu untuk terlibat dalam memberikan ide atau kritik terkait keputusan yang akan diambil. Dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, selain dengan memberikan undangan, Pemerintah Nagari juga memancing antusias masyarakat

seperti menyediakan dana awal untuk pembangunan dan selanjutnya masyarakat secara sadar diri juga ikut menyalang. Visi dan pengembangan, visi Nagari berasal dari visi Wali Nagari serta pengembangannya dimusyawarahkan dengan BPRN. Pengembangan dari visi ini menyesuaikan dengan kondisi Nagari Pandai Sikek.

Keempat, yaitu Perlindungan HAM, dalam pelaksanaannya di Pandai Sikek, Pemerintah Nagari telah menghormati hak-hak yang dimiliki setiap warga masyarakat. Pemerintah juga telah menjamin terlindungi dan terpenuhi. Terakhir, yaitu kepatuhan dalam menjalankan mekanisme demokrasi, pelaksanaannya sudah dilakukan dengan baik. Diantaranya, adanya kontrol masyarakat terhadap keputusan pemerintah, terlaksananya pemilihan umum yang teliti dan jujur, terjaminnya hak memilih dan dipilih oleh masyarakat, tersedianya kebebasan dalam mengakses informasi, terjaminnya kebebasan dalam menyatakan pendapat, dan terakhir terjaminnya kebebasan dalam berserikat dan berkumpul bagi masyarakat.

## **V.2. Saran**

1. Dalam bidang pembangunan, Pemerintah Nagari hendaknya menetapkan sebuah standar baku dalam pembuatan keputusan agar adanya acuan yang jelas dalam setiap keputusan yang dibuat. Mekanisme pertanggungjawaban juga agar lebih dioptimalkan, dan BPRN juga dapat menjalankan fungsi dengan baik, sehingga terciptanya keseimbangan di Pemerintahan.

2. Pemerintah Nagari hendaknya memperbanyak media informasi bagi masyarakat agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi, seperti tersedianya papan layanan informasi disetiap jorong beserta rinciannya.
3. Pemerintah Nagari hendaknya lebih terbuka dalam melaporkan laporan keuangan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah masyarakat

